



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA BINTURUNG DENGAN DESA BALAIMEA  
KECAMATAN PAMUKAN UTARA  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Binturung dengan Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Nomor : 146.3/98/KD-BNT/63.02.13.2007/IX/2021 dan Nomor : 146.3/96/63.02.13.2009/IX/2021, yang telah difasilitasi oleh Tim tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru, Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Binturung dengan Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Negara Republik Indonesia Nomor5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Unadang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BINTURUNG DENGAN DESA BALAIMEA KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel, kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas Wilayah Administrasi Desa Binturung dengan Desa Balaima Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas (terlampir) sebagai berikut:

1. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Binturung dengan Desa Balaima Kecamatan Pamukan Utara , kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 23' 49.657''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 39.367''$  BT ( titik koordinat berada pada Sungai Tamiang);
2. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti jalan sawit menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 22' 31.476''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 40.464''$  BT (titik koordinat berada pada Blok Sawit 31-32 BKE);
3. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti jalan menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 22' 30.036''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 35.352''$  BT (titik koordinat berada pada Pringan Sawit Blok E-32 BKE);
4. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti jalan Blok Sawit menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 21' 21.559''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 20.204''$  BT (titik koordinat berada pada Simpang Empat Jembatan Sungai Tibaru); dan
5. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti Blok Sawit menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 20' 25.080''$  LS dan  $116^{\circ} 18' 16.182''$  BT (titik koordinat berada Simpang Empat batas Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur).

### Pasal 3

Posisi TK sebagai dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 19 April 2022

Bupati Kotabaru,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

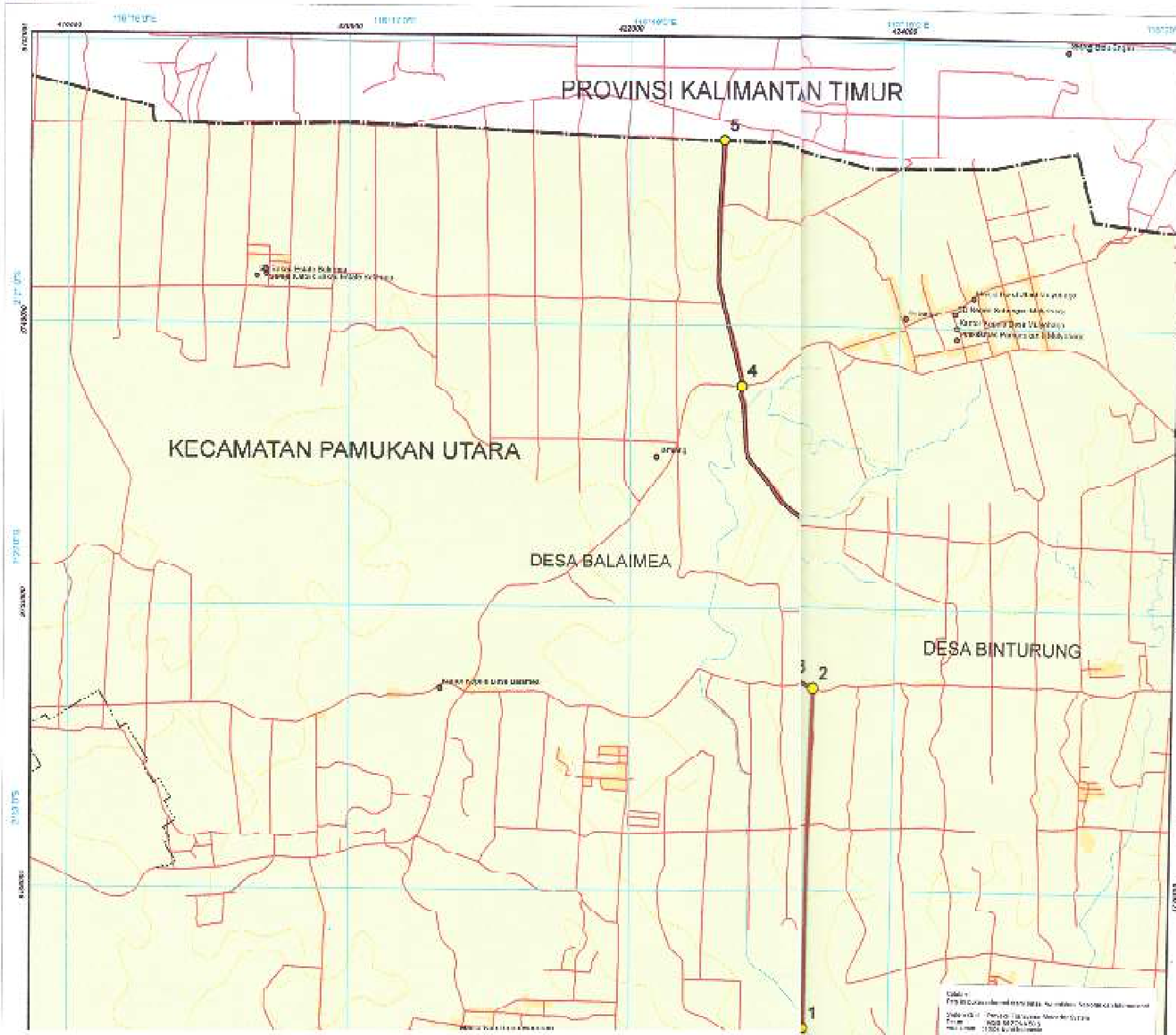


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2022 NOMOR 68



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BINTURUNG  
 DENGAN DESA BALAIMEA KECAMATAN PAMUKAN UTARA  
 KABUPATEN KOTABARU



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
 SEKRETARIAT DAERAH

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA BINTURUNG DENGAN DESA BALAIMEA  
 KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

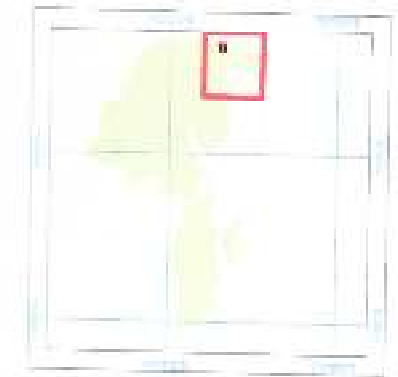


SKALA 1 : 20.000

Keterangan :

- Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi
- Toponimi (Rupa-Rupa Bumi)
- ~ Sungai
- Jalan
- ~ Kontur
- Batas Administrasi Provinsi
- Garis Batas Wilayah Administrasi
- Pemukiman
- Tubuh Air

Referensi Peta:  
 1. Peta RTM Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2012  
 2. Peta Dasar Baku Indonesia  
 3. Hasil Pengukuran Hasil Pemetaan Zonasi Desa antara Desa Binturung dengan Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara



BUPATI KOTABARU,  
  
 SAYED JAFAR